

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka peneliti dapat memberikan kesimpulan bahwa:

Perlindungan hukum konsumen yang dimaksud adalah melindungi hak-hak konsumen yang diatur dalam Pasal 4 UUPK. Kasus peredaran obat palsu di Indonesia dapat dikatakan melanggar hak-hak konsumen seperti yang diatur pada Pasal 4 huruf a UUPK tentang hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa; Pasal 4 huruf c UUPK mengenai hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa; Pasal 4 huruf d UUPK tentang hak untuk didengar pendapat dan keluhannya; serta Pasal 4 huruf e UUPK mengenai hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Tujuan perlindungan hukum terhadap konsumen obat agar konsumn merasa nyaman dan aman. Terkait dengan peredaran obat yang mengandung bahan berbahaya secara normatif sebenarnya pemerintah dan jajarannya sudah mengupayakan dengan mengeluarkan peraturan-peraturan mengenai pembinaan dan pengawasan berdasarkan Keputusan Kepala Badan POM RI Nomor HK.03.1.23.10.11.08481 tentang Kriteria dan Tata Laksana Registrasi Obat dan

sanksi berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang diharapkan dapat membuat para pelaku usaha sadar sehingga melakukan usaha dengan iktikad baik.

Perlindungan terhadap hak konsumen obat atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa dalam Peraturan Kepala BPOM RI Nomor Hk.00.05.1.23.3516 tentang Izin Edar Produk Obat, Obat Tradisional, Obat, Suplemen Makanan Dan Makanan Yang Bersumber, Mengandung, Dari Bahan Tertentu Dan Atau Mengandung Alkohol sebenarnya sudah diatur secara jelas berkaitan dengan kewajiban pelaku usaha untuk memberi informasi yang selengkap-lengkapnyanya untuk menghindari timbulnya kerugian pada pihak konsumen obat.

Bagi konsumen obat yang menderita kerugian, berdasarkan Pasal 19 UUPK pelaku usaha diwajibkan untuk memberi ganti kerugian. Sedangkan dari pihak pemerintah mempunyai tanggung jawab untuk membina, mengawasi, dan memfasilitasi agar konsumen obat mendapatkan apa yang menjadi haknya.

B. Saran

- a. Pelaku usaha dalam menjalankan usahanya sebaiknya menunjukkan iktikad baik dan memberikan informasi yang jelas atas barang dan atau jasa yang diedarkan

serta berupaya memperhatikan hak-hak konsumen dan kewajibannya sebagai pelaku usaha yang telah dirumuskan dalam UUPK.

- b. Pemerintah seyogyanya meningkatkan pengawasan terhadap peredaran obat palsu dan kadaluwarsa agar dapat meminimalisir kerugian konsumen.
- c. Konsumen obat hendaknya lebih hati-hati dalam membeli dan mengkonsumsi produk obat agar terhindar dari bahaya.